



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan dalam upaya penataan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan hasil validasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/253/M.SM.02.00/2023, telah diperoleh Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Wali kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang merupakan unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

9. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menetapkan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Dumai secara adil, objektif dan transparan berdasarkan Evaluasi Jabatan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali kota ini adalah untuk memberikan standar dalam penyusunan peringkat jabatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan.

### BAB II EVALUASI JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan Evaluasi Jabatan dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi jabatan dengan *Factor Evaluation System*.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan berupa Nama Jabatan, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Informasi Faktor Jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi PNS.

#### Pasal 4

- (1) Metode *Factor Evaluation System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digunakan untuk menentukan bobot jabatan yang terdiri dari kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria dalam Informasi Faktor Jabatan.
- (2) Bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jabatan manajerial; dan
  - b. jabatan non manajerial.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
  - a. Jabatan Manajerial meliputi:
    1. ruang lingkup dan dampak;
    2. pengaturan organisasi;
    3. wewenang;
    4. sifat hubungan;
    5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
    6. kondisi lain;
  - b. Jabatan Non Manajerial meliputi:
    1. pengetahuan dan keahlian;
    2. pengawasan;
    3. pedoman kerja;
    4. kompleksitas;
    5. ruang lingkup dan dampak;
    6. hubungan interpersonal;
    7. tujuan hubungan;
    8. tuntutan fisik; dan
    9. lingkungan kerja.
- (4) Bobot Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Tabel Kelas Jabatan dan Nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 5

- (1) Penilaian untuk Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- (2) Penilaian untuk Kelas Jabatan Non Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, didasarkan pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

## BAB III KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN

### Pasal 6

- (1) Kelas Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Pegawai berdasarkan sifat, jenis, beban pekerjaan dan besaran tunjangan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui Evaluasi Jabatan.
- (3) Penyusunan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas; dan
  - b. Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (3) Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV PERUBAHAN NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN

### Pasal 8

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
  - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Jabatan;
  - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada Jabatan; atau
  - c. hal lain yang menyebabkan perubahan Informasi Faktor Jabatan.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan.

- (5) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Apabila tidak tercantum nama jabatan dalam kolom Nama Jabatan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini mengenai nilai jabatan dan kelas jabatan, maka dipersamakan dengan Jabatan yang penjabaran tugasnya memiliki kesesuaian.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 14 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DAN  
NILAI JABATAN

DAFTAR KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PADA JABATAN STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
<b>I. SEKRETARIAT DAERAH.</b>			
1	Sekretaris Daerah	15	3.555
2	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	13	2715
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Informasi Teknologi, Ekonomi dan Keuangan	13	2715
4	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	13	2715
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3.030
6	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	2.315
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2.315
8	Kepala Bagian Hukum	12	2.315
9	Kepala Bagian Kerja Sama	12	2.315
10	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	3.030
11	Kepala Bagian Perekonomian	12	2.315
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12	2.315
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	2.315
14	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	12	2.315
15	Asisten Administrasi Umum	14	3.030
16	Kepala Bagian Umum	12	2.315
17	Kepala Bagian Organisasi	12	2.315
18	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	2.315
19	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	2.315
20	Kepala Subbagian Protokol	9	
<b>II. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.</b>			
21	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	2.865
22	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	11	2.090
23	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	1.430
24	Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan	11	2.090
25	Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan	11	2.090
<b>III. INSPEKTORAT DAERAH.</b>			
26	Inspektur Daerah	14	3.030
27	Sekretaris Inspektorat Daerah	12	2.140
28	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	9	1.430
29	Inspektur Pembantu I	11	1.990
30	Inspektur Pembantu II	11	1.990
31	Inspektur Pembantu III	11	1.990
32	Inspektur Pembantu IV	11	1.990
33	Inspektur Pembantu V	11	1.990
<b>IV. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.</b>			
34	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	2.865
35	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	2.115
36	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
37	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	11	2.045
38	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak	9	1.430
39	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal	9	1.430
40	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	11	2.045
41	Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik dan Kelembagaan Sekolah Dasar	9	1.430

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
42	Kepala Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Dasar	9	1.430
43	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11	2.045
44	Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama	9	1.430
45	Kepala Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9	1.430
46	Kepala Bidang Kebudayaan	11	2.045
<b>V. DINAS KESEHATAN.</b>			
47	Kepala Dinas Kesehatan	14	2.865
48	Sekretaris Dinas Kesehatan	12	2.115
49	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
50	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
51	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	2.045
52	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	2.045
53	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11	2.045
54	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	2.045
55	Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi farmasi Kelas A	9	1.430
56	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
57	Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	9	1.430
58	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
<b>VI. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.</b>			
59	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	13	2.715
60	Wakil Direktur Pelayanan	12	2.115
61	Kepala Bidang Pelayanan	11	2.045
62	Kepala Bidang Keperawatan	11	2.045
63	Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis	11	2.045
64	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	12	2.115
65	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	11	2.045
66	Kepala Bagian Keuangan dan Aset	11	2.045
67	Kepala Bagian Perencanaan dan Program	11	2.045
<b>VII. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.</b>			
68	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	2.865
69	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	2.115
70	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
71	Kepala Subbagian Data dan Informasi Publik	9	1.430
72	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11	2.045
73	Kepala Bidang Bina Marga	11	2.045
74	Kepala Bidang Cipta Karya	11	2.045
75	Kepala Bidang Tata Ruang	11	2.045
76	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan	11	2.045
77	Kepala Unit Pelaksana Teknis Peningkatan dan pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A	9	1.430
78	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
79	Kepala Unit Pelaksana Teknis Peningkatan dan pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A	9	1.430
80	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
81	Kepala Unit Pelaksana Teknis Peningkatan dan pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A	9	1.430
82	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
<b>VIII. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.</b>			
83	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14	2.865
84	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12	2.115
85	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
86	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	11	2.045
87	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	11	2.045
88	Kepala Bidang Pertanahan	11	2.045

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
<b>IX. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.</b>			
89	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	14	2.865
90	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	12	2.115
91	Kepala Subbagian Ketatausahaan	9	1.430
92	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	2.045
93	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11	2.045
94	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	11	2.045
95	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	11	2.045
<b>X. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.</b>			
96	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	2.865
97	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	2.115
98	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430
99	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
100	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	2.045
101	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2.045
102	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	2.045
103	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	2.045
<b>XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP.</b>			
104	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	2.865
105	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	2.115
106	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
107	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
108	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan	11	2.045
109	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	11	2.045
110	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	11	2.045
111	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	11	2.045
112	Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A	9	1.430
113	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
114	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Kelas A	9	1.430
115	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
<b>XII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.</b>			
116	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	2.865
117	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	2.115
118	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
119	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga	11	2.045
120	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	11	2.045
121	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan	11	2.045
122	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	11	2.045
123	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A	9	1.430
124	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
<b>XIII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.</b>			
125	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	2.865
126	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	2.115
127	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	9	1.430
128	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
129	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	11	2.045
130	Kepala Bidang Keluarga Berencana	11	2.045
131	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	2.045
<b>XIV. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.</b>			
132	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	2.865
133	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	2.115
134	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
<b>XV. DINAS PERDAGANGAN.</b>			
135	Kepala Dinas Perdagangan	14	2.865
136	Sekretaris Dinas Perdagangan	12	2.115
137	Kepala Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	9	1.430
138	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
139	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	11	2.045
140	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	11	2.045
141	Kepala Bidang Kemetrolagian	11	2.045
<b>XVI. DINAS PERHUBUNGAN.</b>			
142	Kepala Dinas Perhubungan	14	2.865
143	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	2.115
144	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	9	1.430
145	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	9	1.430
146	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430
147	Kepala Bidang Lalu Lintas	11	2.045
148	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas	9	1.430
149	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas	9	1.430
150	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	11	2.045
151	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek	9	1.430
152	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang	9	1.430
153	Kepala Bidang Prasarana	11	2.045
154	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	9	1.430
155	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	9	1.430
156	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	11	2.045
157	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	9	1.430
158	Kepala Seksi Keselamatan	9	1.430
159	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A	9	1.430
160	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
161	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kelas A	9	1.430
162	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
<b>XVII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.</b>			
163	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14	2.865
164	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12	2.115
165	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
166	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	11	2.045
167	Kepala Bidang Perkebunan	11	2.045
168	Kepala Bidang Peternakan	11	2.045
169	Kepala Bidang Penyuluhan	11	2.045
170	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	2.045
171	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	11	2.045
172	Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Kelas A	9	1.430
173	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
174	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Laboratorium Veteriner Kelas A	9	1.430
175	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
176	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Kelas A	9	1.430
177	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
<b>XVIII. DINAS TENAGA KERJA.</b>			
178	Kepala Dinas Tenaga Kerja	14	2.865
179	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	12	2.115
180	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
181	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas	11	2.045
182	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	11	2.045
183	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	2.045

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
<b>XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.</b>			
184	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	2.865
185	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	2.115
186	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
187	Kepala Bidang Perpustakaan	11	2.045
188	Kepala Bidang Kearsipan	11	2.045
<b>XX. DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA.</b>			
189	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	2.865
190	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12	2.115
191	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
192	Kepala Bidang Kepemudaan	11	2.045
193	Kepala Bidang Olahraga	11	2.045
194	Kepala Bidang Pariwisata	11	2.045
195	kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A	9	1.430
196	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
<b>XXI. DINAS PERIKANAN.</b>			
197	Kepala Dinas Perikanan	14	2.865
198	Sekretaris Dinas Perikanan	12	2.115
199	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
200	Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan	11	2.045
201	Kepala Bidang Kenelayanan	11	2.045
202	Kepala Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Kelas A	9	1.430
203	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
204	Kepala Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan Air Tawar Kelas A	9	1.430
205	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
<b>XXII. DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN.</b>			
206	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	14	2.865
207	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	12	2.115
208	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	9	1.430
209	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
210	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	11	2.045
211	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	11	2.045
212	Kepala Bidang Perindustrian	11	2.045
213	kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri Kelas A	9	1.430
214	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
<b>XXIII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN.</b>			
215	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	14	2.865
216	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12	2.115
217	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
218	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	2.045
219	Kepala Bidang Layanan Infrastruktur <i>E-Government</i>	11	2.045
220	Kepala Bidang Layanan Aplikasi <i>E-Government</i>	11	2.045
221	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	11	2.045
<b>XXIV. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.</b>			
222	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	2.865
223	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	2.115
224	Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset	9	1.430
225	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
226	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	11	2.045
227	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	9	1.430
228	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	9	1.430
229	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	2.045
230	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	9	1.430

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
231	Kepala Seksi Pemantauan dan Tindak Internal	9	1.430
232	Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur	11	2.045
233	Kepala Seksi Satlinmas	9	1.430
234	Kepala Seksi Data Informasi dan Pelatihan	9	1.430
<b>XXV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.</b>			
235	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	14	3.030
236	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12	2.140
237	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
238	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	2.045
239	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11	2.045
240	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	11	2.045
241	Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah	11	2.045
242	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	2.045
<b>XXVI. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.</b>			
243	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	3.030
244	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	2.140
245	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
246	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
247	Kepala Bidang Anggaran	11	2.045
248	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran	9	1.430
249	Kepala Subbidang Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran	9	1.430
250	Kepala Bidang Aset	11	2.045
251	Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset	9	1.430
252	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset	9	1.430
253	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	11	2.045
254	Kepala Subbidang Pelaporan	9	1.430
255	Kepala Subbidang Akuntansi	9	1.430
256	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	2.045
257	Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	9	1.430
258	Kepala Subbidang Belanja Daerah	9	1.430
<b>XXVII. BADAN PENDAPATAN DAERAH.</b>			
259	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	3.030
260	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	12	2.140
261	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
262	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	9	1.430
263	Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11	2.045
264	Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan	9	1.430
265	Kepala Subbidang Penetapan	9	1.430
266	Kepala Bidang Penagihan	11	2.045
267	Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan	9	1.430
268	Kepala Subbidang Penagihan	9	1.430
269	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11	2.045
270	Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9	1.430
271	Kepala Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9	1.430
272	Kepala Bidang Hukum dan Keberatan	11	2.045
273	Kepala Subbidang Pengajuan dan Keberatan	9	1.430
274	Kepala Subbidang Pemeriksaan	9	1.430
<b>XXVIII. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.</b>			
275	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	2.865
276	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	2.115
277	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	9	1.430
278	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1.430
279	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	11	2.045

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
280	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan	11	2.045
281	Kepala Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	11	2.045
<b>XXIX. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.</b>			
282	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	2.465
283	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
284	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9	1.430
285	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	9	1.430
286	Kepala Seksi Rehabilitas dan Kontruksi	9	1.430
287	kepala Unit Pelaksana Teknis pemadam Kebakaran Kelas A	9	1.430
288	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
<b>XXX. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.</b>			
289	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	2.865
290	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	2.115
291	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
292	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	11	2.045
293	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	11	2.045
294	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	11	2.045
295	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	11	2.045
<b>XXXI. KECAMATAN DUMAI BARAT.</b>			
296	Camat Dumai Barat	12	2.315
297	Sekretaris Kecamatan Dumai Barat	11	2.090
298	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
299	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
300	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455
301	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
302	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	1.455
303	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9	1.455
304	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	1.455
<b>A. KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN.</b>			
305	Lurah Simpang Tetap Darul Ikhsan	9	1.540
306	Sekretaris Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	8	1.320
307	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
308	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
309	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>B. KELURAHAN PURNAMA.</b>			
310	Lurah Purnama	9	1.540
311	Sekretaris Kelurahan Purnama	8	1.320
312	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
313	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
314	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>C. KELURAHAN PANGKALAN SESAI.</b>			
315	Lurah Pangkalan Sesai	9	1.540
316	Sekretaris Kelurahan Pangkalan Sesai	8	1.320
317	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
318	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
319	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>D. KELURAHAN BAGAN KELADI.</b>			
320	Lurah Bagan Keladi	9	1.540
321	Sekretaris Kelurahan Bagan Keladi	8	1.320
322	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
323	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
324	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
<b>XXXII. KECAMATAN DUMAI TIMUR.</b>			
325	Camat Dumai Timur	12	2.315
326	Sekretaris Kecamatan Dumai Timur	11	2.090
327	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
328	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
329	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455
330	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
331	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	1.455
332	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9	1.455
333	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	1.455
<b>A. KELURAHAN BUKIT BATREM.</b>			
334	Lurah Bukit Batrem	9	1.540
335	Sekretaris Kelurahan Bukit Batrem	8	1.320
336	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
337	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
338	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>B. KELURAHAN BULUH KASAP.</b>			
339	Lurah Buluh Kasap	9	1.540
340	Sekretaris Kelurahan Buluh Kasap	8	1.320
341	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
342	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
343	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>C. KELURAHAN JAYA MUKTI.</b>			
344	Lurah Jaya Mukti	9	1.540
345	Sekretaris Kelurahan Jaya Mukti	8	1.320
346	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
347	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
348	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>D. KELURAHAN TANJUNG PALAS.</b>			
349	Lurah Tanjung Palas	9	1.540
350	Sekretaris Kelurahan Tanjung Palas	8	1.320
351	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
352	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
353	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>E. KELURAHAN TELUK BINJAI.</b>			
354	Lurah Teluk Binjai	9	1.540
355	Sekretaris Teluk Binjai	8	1.320
356	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
357	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
358	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>XXXIII. KECAMATAN BUKIT KAPUR.</b>			
359	Camat Bukit Kapur	12	2.315
360	Sekretaris Kecamatan Bukit Kapur	11	2.090
361	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
362	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
363	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455
364	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
365	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	1.455
366	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9	1.455
367	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	1.455

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
<b>A. KELURAHAN BUKIT KAPUR.</b>			
368	Lurah Bukit Kapur	9	1.540
369	Sekretaris Kelurahan Bukit Kapur	8	1.320
370	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
371	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
372	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>B. KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR.</b>			
373	Lurah Bagan Besar Timur	9	1.540
374	Sekretaris Kelurahan Bagan Besar Timur	8	1.320
375	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
376	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
377	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>C. KELURAHAN BUKIT NENAS.</b>			
378	Lurah Bukit Nenas	9	1.540
379	Sekretaris Kelurahan Bukit Nenas	8	1.320
380	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
381	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
382	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>D. KELURAHAN BAGAN BESAR.</b>			
383	Lurah Bagan Besar	9	1.540
384	Sekretaris Bagan Besar	8	1.320
385	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
386	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
387	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>E. KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR.</b>			
388	Lurah Bukit Kayu Kapur	9	1.540
389	Sekretaris Kelurahan Bukit Kayu Kapur	8	1.320
390	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
391	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
392	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>F. KELURAHAN GURUN PANJANG.</b>			
393	Lurah Gurun Panjang	9	1.540
394	Sekretaris Kelurahan Gurun Panjang	8	1.320
395	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
396	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
397	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>G. KELURAHAN KAMPUNG BARU.</b>			
398	Lurah Kampung Baru	9	1.540
399	Sekretaris Kelurahan Kampung Baru	8	1.320
400	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
401	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
402	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>XXXIV. KECAMATAN MEDANG KAMPAI.</b>			
403	Camat Medang Kampai	12	2.315
404	Sekretaris Kecamatan Medang Kampai	11	2.090
405	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
406	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
407	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455
408	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
409	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	1.455
410	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9	1.455
411	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	1.455

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
<b>A. KELURAHAN MUNDAM.</b>			
412	Lurah Mundam	9	1.540
413	Sekretaris Kelurahan Mundam	8	1.320
414	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
415	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
416	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>B. KELURAHAN TELUK MAKMUR.</b>			
417	Lurah Teluk Makmur	9	1.540
418	Sekretaris Kelurahan Teluk Makmur	8	1.320
419	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
420	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
421	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>C. KELURAHAN GUNTING.</b>			
422	Lurah Guntung	9	1.540
423	Sekretaris Kelurahan Guntung	8	1.320
424	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
425	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
426	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>D. KELURAHAN PELINTUNG.</b>			
427	Lurah Pelintung	9	1.540
428	Sekretaris Kelurahan Pelintung	8	1.320
429	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
430	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
431	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>XXXV. KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.</b>			
432	Camat Sungai Sembilan	12	2.315
433	Sekretaris Kecamatan Sungai Sembilan	11	2.090
434	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
435	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
436	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455
437	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
438	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	1.455
439	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9	1.455
440	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	1.455
<b>A. KELURAHAN SUNGAI GENIOT.</b>			
441	Lurah Sungai Geniot	9	1.540
442	Sekretaris Kelurahan Sungai Geniot	8	1.320
443	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
444	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
445	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>B. KELURAHAN LUBUK GAUNG.</b>			
446	Lurah Lubuk Gaung	9	1.540
447	Sekretaris Kelurahan Lubuk Gaung	8	1.320
448	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
449	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
450	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>C. KELURAHAN BANGSAL ACEH.</b>			
451	Lurah Bangsal Aceh	9	1.540
452	Sekretaris Kelurahan Bangsal Aceh	8	1.320
453	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
454	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
455	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
<b>D. KELURAHAN BASILAM BARU.</b>			
456	Lurah Basilam Baru	9	1.540
457	Sekretaris Kelurahan Basilam Baru	8	1.320
458	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
459	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
460	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>E. KELURAHAN BATU TERITIP.</b>			
461	Lurah Batu Teritip	9	1.540
462	Sekretaris Kelurahan Batu Teritip	8	1.320
463	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
464	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
465	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295
<b>F. KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL.</b>			
466	Lurah Tanjung Penyembal	9	1.540
467	Sekretaris Kelurahan Tanjung Penyembal	8	1.320
468	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
469	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
470	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>XXXVI. KECAMATAN DUMAI KOTA.</b>			
471	Camat Dumai Kota	12	2.315
472	Sekretaris Kecamatan Dumai Kota	11	2.090
473	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
474	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
475	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455
476	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
477	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	1.455
478	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9	1.455
479	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	1.455
<b>A. KELURAHAN DUMAI KOTA.</b>			
480	Lurah Dumai Kota	9	1.540
481	Sekretaris Kelurahan Dumai Kota	8	1.320
482	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
483	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
484	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>B. KELURAHAN LAKSAMANA.</b>			
485	Lurah Laksamana	9	1.540
486	Sekretaris Kelurahan Laksamana	8	1.320
487	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
488	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
489	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>C. KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG.</b>			
490	Lurah Rimba Sekampung	9	1.540
491	Sekretaris Kelurahan Rimba Sekampung	8	1.320
492	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
493	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
494	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>D. KELURAHAN SUKAJADI.</b>			
495	Lurah Sukajadi	9	1.540
496	Sekretaris Kelurahan Sukajadi	8	1.320
497	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
498	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
499	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
<b>E. KELURAHAN BINTAN.</b>			
500	Lurah Bintan	9	1.540
501	Sekretaris Kelurahan Bintan	8	1.320
502	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
503	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
504	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>XXXVII. KECAMATAN DUMAI SELATAN.</b>			
505	Camat Dumai Selatan	12	2.315
506	Sekretaris Kecamatan Dumai Selatan	11	2.090
507	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	8	1.320
508	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.320
509	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455
510	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
511	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	1.455
512	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	9	1.455
513	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	1.455
<b>A. KELURAHAN BUKIT DATUK.</b>			
514	Lurah Bukit Datuk	9	1.540
515	Sekretaris Kelurahan Bukit Datuk	8	1.320
516	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
517	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
518	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>B. KELURAHAN BUMI AYU.</b>			
519	Lurah Bumi Ayu	9	1.540
520	Sekretaris Kelurahan Bumi Ayu	8	1.320
521	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
522	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
523	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>C. KELURAHAN BUKIT TIMAH</b>			
524	Lurah Bukit Timah	9	1.540
525	Sekretaris Kelurahan Bukit Timah	8	1.320
526	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.165
527	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
528	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>D. KELURAHAN RATU SIMA.</b>			
529	Lurah Ratu Sima	9	1.540
530	Sekretaris Kelurahan Ratu Sima	8	1.320
531	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
532	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.165
533	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.165
<b>E. KELURAHAN MEKAR SARI.</b>			
534	Lurah Mekar Sari	9	1.540
535	Sekretaris Kelurahan Mekar Sari	8	1.320
536	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.295
537	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	8	1.295
538	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8	1.295

WALI KOTA DUMAI

dto

PAISAL

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DAN  
NILAI JABATAN

DAFTAR KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN  
PADA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
<b>A. JABATAN FUNGSIONAL</b>			
1	JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
2	JF Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	1930
3	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1355
4	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
5	JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	1280
6	JF Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda (PJ)	9	1.430
7	JF Analis Akuakultur Ahli Muda (PJ)	9	1.430
8	JF Analis Anggaran Ahli Muda	10	1780
9	JF Analis Anggaran Ahli Pertama	8	1205
10	JF Analis Data Ilmiah Ahli Muda (PJ)	9	1.430
11	JF Analis Hukum Ahli Muda (PJ)	9	1.430
12	JF Analis Hukum Ahli Pertama	8	1.280
13	JF Analis Kebakaran Ahli Muda	9	1.415
14	JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	8	1.295
15	JF Analis Kebencanaan Ahli Muda	9	1435
16	JF Analis Kebijakan Ahli Madya (PJ)	11	2.045
17	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1735
18	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
19	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	1280
20	JF Analis Kepegawaian Ahli Muda	9	1355
21	JF Analis Kepegawaian Ahli Muda (PJ)	9	1.430
22	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8	1280
23	JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
24	JF Analis Keuangan dan Daerah Ahli Muda (PJ)	9	1.430
25	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	1870
26	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (PJ)	9	1.430
27	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	1295
28	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	1280
29	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil	6	740
30	JF Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda (PJ)	9	1.430
31	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	10	1.705
32	JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	8	1.220
33	JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya	12	2135
34	JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	1735
35	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	1280
36	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (PJ)	9	1.430
37	JF Apoteker Ahli Madya	11	1945
38	JF Apoteker Ahli Muda	9	1370
39	JF Apoteker Ahli Pertama	8	1295
40	JF Arsiparis Ahli Muda (PJ)	9	1.430
41	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
42	JF Arsiparis Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1005
43	JF Arsiparis Terampil	6	740

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
44	JF Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10	1770
45	JF Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8	1280
46	JF Asesor SDM Aparatur Ahli Muda (PJ)	9	1.430
47	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	755
48	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1020
49	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1245
50	JF Asisten Penata Anestesi Ahli Muda	9	1355
51	JF Asisten Penata Anestesi Ahli Pertama	8	1290
52	JF Asisten Penata Anestesi Pelaksana	6	835
53	JF Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan	7	1015
54	JF Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	1290
55	JF Auditor Ahli Madya	12	2250
56	JF Auditor Ahli Muda	10	1655
57	JF Auditor Ahli Pertama	8	1280
58	JF Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	8	1280
59	JF Auditor Pelaksana	6	690
60	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	940
61	JF Auditor Penyelia	9	1380
62	JF Bidan Ahli Madya	11	1930
63	JF Bidan Ahli Muda	9	1355
64	JF Bidan Ahli Pertama	8	1280
65	JF Bidan Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1005
66	JF Bidan Penyelia	8	1230
67	JF Bidan Terampil / Pelaksana	6	740
68	JF Dokter Ahli Madya	12	2225
69	JF Dokter Ahli Muda	10	1720
70	JF Dokter Ahli Pertama	9	1570
71	JF Dokter Gigi Ahli Madya	12	2225
72	JF Dokter Gigi Ahli Muda	10	1670
73	JF Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1370
74	JF Dokter Gigi Ahli Utama	14	2805
75	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	1930
76	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	1555
77	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JP)	9	1.430
78	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	1280
79	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	740
80	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1005
81	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	1230
82	JF Fisikawan Medis Ahli Madya	11	1930
83	JF Fisikawan Medis Ahli Muda	9	1555
84	JF Fisikawan Medis Ahli Pertama	8	1280
85	JF Fisioterapis Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1005
86	JF Fisioterapis Penyelia	8	1230
87	JF Fisioterapis Terampil /Pelaksana	6	740
88	JF Guru Madya	11	1960
89	JF Guru Muda	9	1385
90	JF Guru Pertama	8	1280
91	JF Instruktur Ahli Madya	12	2200
92	JF Instruktur Ahli Muda (PJ)	9	1.430
93	JF Instruktur Ahli Pertama	8	1265
94	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	12	2170
95	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda (PJ)	9	1.430
96	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	1310

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
97	JF Medik Veteriner Ahli Muda (PJ)	9	1.430
98	JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	1280
99	JF Nutrisionis Ahli Madya	11	1930
100	JF Nutrisionis Ahli Muda	9	1555
101	JF Nutrisionis Ahli Muda (JP)	9	1.430
102	JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	1280
103	JF Nutrisionis Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1005
104	JF Nutrisionis Pelaksana / Terampil	6	740
105	JF Nutrisionis Penyelia	8	1230
106	JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	6	740
107	JF Pamong Belajar Ahli Pertama	8	1280
108	JF Pamong Budaya Ahli Muda (PJ)	9	1.430
109	JF Pamong Budaya Ahli Pertama	8	1280
110	JF Paramedik Veteriner Penyelia	8	1230
111	JF Paramedik Veteriner Terampil / Pelaksana	6	740
112	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	9	1355
113	JF Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	1280
114	JF Pekerja Sosial Mahir	7	1005
115	JF Pekerja Sosial Pemula	5	490
116	JF Pekerja Sosial Penyelia	8	1230
117	JF Pekerja Sosial Terampil	6	740
118	JF Pemadam Kebakaran Mahir	7	1.000
119	JF Pemadam Kebakaran Pemula	5	630
120	JF Pemadam Kebakaran Penyelia	8	1.275
121	JF Pemadam Kebakaran Terampil	6	695
122	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	1355
123	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	1280
124	JF Pembina Industri Ahli Muda (JP)	9	1.430
125	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (PJ)	9	1.430
126	JF Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Ahli Muda (PJ)	9	1.430
127	JF Penata Anestesi Ahli Madya	11	2055
128	JF Penata Anestesi Ahli Muda	9	1600
129	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (PJ)	9	1.430
130	JF Penata Laksana Barang Pelaksana	7	1070
131	JF Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan	8	1275
132	JF Penata Laksana Barang Penyelia	9	1550
133	JF Penata Ruang Ahli Muda (PJ)	9	1.430
134	JF Penata Ruang Ahli Pertama	8	1280
135	JF Penera Ahli Madya	11	1930
136	JF Penera Ahli Muda (PJ)	9	1.430
137	JF Penera Ahli Pertama	8	1280
138	JF Penera Mahir	7	1005
139	JF Penera Penyelia	8	1230
140	JF Penera Terampil	6	740
141	JF Pengamat Tera Ahli Pertama	8	1280
142	JF Pengamat Tera Mahir	7	1005
143	JF Pengamat Tera Penyelia	8	1230
144	JF Pengamat Tera Terampil	6	740
145	JF Pengantar Kerja Ahli Madya	12	2200
146	JF Pengantar Kerja Ahli Muda (PJ)	9	1.430
147	JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	1280
148	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	8	1.265
149	JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda (PJ)	9	1.430

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
150	JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	8	1280
151	JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda (PJ)	9	1.430
152	JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	1280
153	JF Pengawas Bibit Ternak Terampil	6	740
154	JF Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda (JP)	9	1.430
155	JF Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	1280
156	JF Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya	11	1930
157	JF Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda (PJ)	9	1.430
158	JF Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama	8	1280
159	JF Pengawas Koperasi Ahli Madya	12	2135
160	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda (JP)	9	1.430
161	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (PJ)	9	1.430
162	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (PJ)	9	1.430
163	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	1280
164	JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
165	JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	8	1280
166	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	12	2145
167	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	10	1655
168	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	8	1280
169	JF Pengawas Perikanan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
170	JF Pengawas Perikanan Ahli Pertama	8	1280
171	JF Pengawas Sekolah Ahli Madya	11	1960
172	JF Pengawas Sekolah Ahli Muda	9	1385
173	JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
174	JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	8	1245
175	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10	1695
176	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda (PJ)	9	1.430
177	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8	1270
178	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (PJ)	9	1.430
179	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	8	1.280
180	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
181	JF Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
182	JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (PJ)	9	1.430
183	JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	1205
184	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda (PJ)	9	1.430
185	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Terampil	6	840
186	JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	8	1295
187	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	8	1295
188	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	11	1960
189	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (PJ)	9	1.430
190	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	770
191	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	1035
192	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	1260
193	JF Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Muda	10	1750
194	JF Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	1340
195	JF Penguji Mutu Barang Ahli Muda	9	1355
196	JF Penguji Mutu Barang Ahli Muda (PJ)	9	1.430
197	JF Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	8	1295
198	JF Penilai Pemerintah Ahli Muda (PJ)	9	1.430
199	JF Penilai Pemerintah Pertama	8	1.270
200	JF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	10	1.705
201	JF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda (PJ)	9	1.430
202	JF Penyuluh Agama Ahli Muda (PJ)	9	1.430

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
203	JF Penyuluh Hukum Ahli Muda (PJ)	9	1.430
204	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	11	1930
205	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	1355
206	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JP)	9	1.430
207	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	1280
208	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770
209	JF Penyuluh Perikanan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
210	JF Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	8	1310
211	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	11	2030
212	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya (PJ)	11	2.045
213	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
214	JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	1385
215	JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda (PJ)	9	1.430
216	JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	1310
217	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	2030
218	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1260
219	JF Penyuluh Sosial Ahli Muda (PJ)	9	1.430
220	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
221	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	1280
222	JF Perawat Ahli Madya	11	1960
223	JF Perawat Ahli Muda	9	1385
224	JF Perawat Ahli Pertama	8	1280
225	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1035
226	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1260
227	JF Perawat Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1035
228	JF Perawat Penyelia	8	1260
229	JF Perawat Terampil / Pelaksana	6	770
230	JF Perekam Medis Ahli Madya	11	1960
231	JF Perekam Medis Ahli Muda	9	1385
232	JF Perekam Medis Ahli Pertama	8	1280
233	JF Perekam Medis Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1035
234	JF Perekam Medis Penyelia	8	1260
235	JF Perekam Medis Terampil / Pelaksana	6	770
236	JF Perencana Ahli Madya	12	2170
237	JF Perencana Ahli Muda	10	1610
238	JF Perencana Ahli Muda (PJ)	9	1.430
239	JF Perencana Ahli Pertama	8	1280
240	JF Perisalah Legislatif Ahli Muda (PJ)	9	1.430
241	JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya	11	2085
242	JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	1445
243	JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda (PJ)	9	1.430
244	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	8	1270
245	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	745
246	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	1095
247	JF Polisi Pamong Praja Pemula	5	580
248	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	8	1320
249	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (PJ)	9	1.430
250	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1280
251	JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	1930
252	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	1355
253	JF Pranata Komputer Ahli Muda (PJ)	9	1.430
254	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
255	JF Pranata Komputer Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1005

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
256	JF Pranata Komputer Penyelia	8	1230
257	JF Pranata Komputer Terampil / Pelaksana	6	740
258	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	1930
259	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	1355
260	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	1280
261	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1005
262	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1230
263	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Pelaksana	6	740
264	JF Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8	1280
265	JF Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	1310
266	JF Pustakawan Ahli Muda	9	1355
267	JF Pustakawan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
268	JF Pustakawan Ahli Pertama	8	1280
269	JF Pustakawan Pelaksana	6	740
270	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1005
271	JF Pustakawan Penyelia	8	1230
272	JF Radiografer Ahli Madya	11	1930
273	JF Radiografer Ahli Muda	9	1355
274	JF Radiografer Ahli Pertama	8	1280
275	JF Radiografer Pelaksana	6	770
276	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	1035
277	JF Radiografer Penyelia	8	1260
278	JF Refraksionis Optisien Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1035
279	JF Refraksionis Optisien Penyelia	8	1260
280	JF Refraksionis Optisien Terampil / Pelaksana	6	770
281	JF Sandiman Ahli Muda	10	1795
282	JF Sandiman Ahli Muda (PJ)	9	1.430
283	JF Sandiman Ahli Pertama	8	1295
284	JF Sanitarian Ahli Madya	11	1930
285	JF Sanitarian Ahli Muda	9	1355
286	JF Sanitarian Ahli Pertama	8	1280
287	JF Sanitarian Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1020
288	JF Sanitarian Penyelia	8	1245
289	JF Sanitarian Terampil / Pelaksana	6	755
290	JF Statistisi Ahli Muda (PJ)	9	1.430
291	JF Statistisi Ahli Pertama	8	1280
292	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
293	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	1325
294	JF Teknik Pengairan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
295	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
296	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana	6	755
297	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (PJ)	9	1.430
298	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	1325
299	JF Teknisi Elektromedis Medis Ahli Madya	11	1930
300	JF Teknisi Elektromedis Medis Ahli Muda	9	1355
301	JF Teknisi Elektromedis Medis Ahli Pertama	8	1280
302	JF Teknisi Elektromedis Medis Pelaksana	6	770
303	JF Teknisi Elektromedis Medis Pelaksana Lanjutan	7	1035
304	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	1260
305	JF Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	11	1960
306	JF Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	9	1385
307	JF Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8	1280
308	JF Terapis Gigi dan Mulut Mahir / Pelaksana Lanjutan	7	1035

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
309	JF Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1260
310	JF Terapis Gigi dan Mulut Terampil / Pelaksana	6	770
<b>B. JABATAN PELAKSANA</b>			
1	Akupunturis	6	690
2	Analisis Angkutan Darat	7	890
3	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	7	890
4	Analisis Aset Daerah	7	890
5	Analisis Bahan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	7	890
6	Analisis Bahan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	7	890
7	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	7	890
8	Analisis Bahan Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Infrastruktur dan Tenaga Pelatihan	7	890
9	Analisis Bahan Penyelenggaraan Program Pemagangan	7	890
10	Analisis Bahan Persyaratan Kerja	7	890
11	Analisis Bahan Tata Kelola Bidang Telekomunikasi	7	890
12	Analisis Bangunan dan Perumahan	7	890
13	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	7	890
14	Analisis Barang Hasil Penindakan	7	890
15	Analisis Barang Milik Negara	7	890
16	Analisis Bencana	7	890
17	Analisis Benih	7	890
18	Analisis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi	7	890
19	Analisis Bina Kehidupan Agama	7	890
20	Analisis Data dan Informasi	7	890
21	Analisis Data dan Kerjasama Diklat	7	890
22	Analisis Data Intelijen	7	890
23	Analisis Data Pengujian Sarana	7	890
24	Analisis Data Sertifikasi Industri Metalurgi	7	890
25	Analisis Data Standarisasi	7	890
26	Analisis Desa dan Kelurahan	7	890
27	Analisis Diklat	7	890
28	Analisis Dokumen Perizinan	7	890
29	Analisis Dukungan Standar Akuntansi Pemerintahan	7	890
30	Analisis Ekonomi Industri	7	890
31	Analisis Ekonomi Kreatif	7	890
32	Analisis Gizi	7	890
33	Analisis Hibah Daerah	7	890
34	Analisis Hukum	7	890
35	Analisis Humas	7	890
36	Analisis Industri	7	890
37	Analisis Informasi	7	890
38	Analisis Informasi Hasil Pertanian	7	890
39	Analisis Informasi Kebudayaan	7	890
40	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur	7	890
41	Analisis Infrastruktur	7	890
42	Analisis Jabatan	7	890
43	Analisis Jalan Jembatan	7	890
44	Analisis Jaminan Sosial	7	890
45	Analisis Jasa Konsultasi	7	890
46	Analisis Kebakaran	7	890
47	Analisis Keberatan dan Banding	7	890
48	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
49	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	890
50	Analisis Kelembagaan	7	890



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
51	Analisis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan	7	890
52	Analisis Keluarga Berencana	7	890
53	Analisis Kemasyarakatan	7	890
54	Analisis Kemitraan	7	890
55	Analisis Kenelayanan	7	890
56	Analisis Keolahragaan	7	890
57	Analisis Kepemudaan	7	890
58	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	890
59	Analisis Kerjasama	7	890
60	Analisis Kerjasama Aparat Penegak Hukum	7	890
61	Analisis Kerjasama Industri	7	890
62	Analisis Kerjasama Lembaga Keagamaan	7	890
63	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7	890
64	Analisis Kesehatan	7	890
65	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	7	890
66	Analisis Kesehatan Kerja	7	890
67	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur	7	890
68	Analisis Keselamatan Transportasi Jalan	7	890
69	Analisis Ketahanan Ekonomi	7	890
70	Analisis Ketenagalistrikan	7	890
71	Analisis Keuangan	7	890
72	Analisis Kinerja	7	890
73	Analisis Klasifikasi Barang	7	890
74	Analisis Kompetensi	7	890
75	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	890
76	Analisis Lalu Lintas	7	890
77	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	890
78	Analisis Laporan Keuangan	7	890
79	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	890
80	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	7	890
81	Analisis Layanan Umum	7	890
82	Analisis Legislasi	7	890
83	Analisis Lingkungan Hidup	7	890
84	Analisis Manajemen Risiko	7	890
85	Analisis Masalah Sosial	7	890
86	Analisis Materi Penyuluhan	7	890
87	Analisis Metalografi	7	890
88	Analisis Mitigasi Bencana	7	890
89	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
90	Analisis Mutu Hasil Perikanan	7	890
91	Analisis Mutu Produk	7	890
92	Analisis Obat dan Makanan	7	890
93	Analisis Objek Wisata	7	890
94	Analisis Pajak Daerah	7	890
95	Analisis Pangan	7	890
96	Analisis Pariwisata	7	890
97	Analisis Pelaksanaan Anggaran	7	890
98	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	7	890
99	Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah	7	890
100	Analisis Pelanggaran Disiplin	7	890
101	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	7	890
102	Analisis Pelayanan	7	890
103	Analisis Pelayanan Publik	7	890

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
104	Analisis Pelayanan Sosial	7	890
105	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	890
106	Analisis Pemanfaatan Teknologi	7	890
107	Analisis Pembangunan	7	890
108	Analisis Pembelajaran Kursus dan Pelatihan	7	890
109	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	890
110	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	890
111	Analisis Pemeriksaan Pajak	7	890
112	Analisis Pemerintahan Daerah	7	890
113	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7	890
114	Analisis Penagihan	7	890
115	Analisis Penagihan Pajak	7	890
116	Analisis Penanaman Modal	7	890
117	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	7	890
118	Analisis Penataan Kawasan	7	890
119	Analisis Pendaftaran Kapal Perikanan	7	890
120	Analisis Penelitian	7	890
121	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	890
122	Analisis Pengamanan Lingkungan	7	890
123	Analisis Penganggaran	7	890
124	Analisis Pengelolaan Keuangan	7	890
125	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	7	890
126	Analisis Pengelolaan Sarana Program	7	890
127	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	890
128	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan	7	890
129	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7	890
130	Analisis Pengembangan Jabatan	7	890
131	Analisis Pengembangan Karir	7	890
132	Analisis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
133	Analisis Pengembangan Kompetensi	7	890
134	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	7	890
135	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	890
136	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7	890
137	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	890
138	Analisis Pengembangan Wilayah	7	890
139	Analisis Penilaian	7	890
140	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	7	890
141	Analisis Penyajian Data Sumber Daya Ikan	7	890
142	Analisis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	7	890
143	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	890
144	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	890
145	Analisis Perbendaharaan	7	890
146	Analisis Perdagangan	7	890
147	Analisis Perencanaan	7	890
148	Analisis Perencanaan Anggaran	7	890
149	Analisis Perencanaan Bisnis	7	890
150	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7	890
151	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	7	890
152	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	7	890
153	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	7	890
154	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
155	Analisis Perizinan Transportasi	7	890
156	Analisis Perlindungan Masyarakat	7	890

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
157	Analisis Perlindungan Perempuan	7	890
158	Analisis Peserta Didik	7	890
159	Analisis Peta Wilayah	7	890
160	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	7	890
161	Analisis Polisi Pamong Praja	7	890
162	Analisis Politik Dalam Negeri	7	890
163	Analisis Produk Hukum	7	890
164	Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	7	890
165	Analisis Program Pembangunan	7	890
166	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	7	890
167	Analisis Program Penyuluhan	7	890
168	Analisis Promosi dan Kerjasama Luar Negeri	7	890
169	Analisis Protokol	7	890
170	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	7	890
171	Analisis Remunerasi	7	890
172	Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	7	890
173	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
174	Analisis Road Traffic And Transport Management Centre	7	890
175	Analisis Sarana Pendidikan Anak Usia Dini	7	890
176	Analisis Sarana Program Keluarga Berencana	7	890
177	Analisis Satuan Pengawas Internal	7	890
178	Analisis Sistem Informasi	7	890
179	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	890
180	Analisis Sistem Informasi Distribusi	7	890
181	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	7	890
182	Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan	7	890
183	Analisis Sistem Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan	7	890
184	Analisis Standar Biaya	7	890
185	Analisis Standar Harga	7	890
186	Analisis Statistik	7	890
187	Analisis Sumber Daya Air	7	890
188	Analisis Sumber Daya Iptek	7	890
189	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
190	Analisis Survei dan Pemetaan Tema Teknologi Informasi Komputer	7	890
191	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	7	890
192	Analisis Taman	7	890
193	Analisis Tata Laksana	7	890
194	Analisis Tata Praja	7	890
195	Analisis Tata Ruang	7	890
196	Analisis Tata Usaha	7	890
197	Analisis Teknik Survei Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7	890
198	Analisis Teknis Survei Penanganan Dampak Transportasi Darat	7	890
199	Analisis Tenaga Kerja	7	890
200	Analisis Transaksi Keuangan	7	890
201	Analisis Transportasi	7	890
202	Analisis Wawasan Kebangsaan	7	890
203	Bendahara	7	890
204	Binatu Rumah Sakit	3	340
205	Fasilitator Perdagangan	7	890
206	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	890
207	Jurnalis	6	690
208	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	690
209	Juru Pungut Retribusi	3	340

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
210	Juru Rawat Jenazah	5	490
211	Juru Sita	6	690
212	Juru Survei Permukiman Perumahan	5	490
213	Konselor	7	890
214	Operator Alat Berat	5	490
215	Operator Global Positioning System	5	490
216	Operator Komputer Grafis	6	690
217	Operator Terminal	5	490
218	Pelaksana Sistem Pengendalian Internal	5	490
219	Pemandu Kerukunan Umat Beragama	5	490
220	Pemantau Pelaksanaan Rencana Umum Energi	5	490
221	Pemelihara Bangunan	5	490
222	Pemelihara Jalan	5	490
223	Pemelihara Peralatan	5	490
224	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
225	Pemeriksa Anggaran	7	890
226	Pemeriksa Industri	7	890
227	Pemeriksa Irigasi	7	890
228	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	890
229	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	7	890
230	Pemeriksa Perempuan dan Anak	7	890
231	Pemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	7	890
232	Pemeriksa Sanitasi	7	890
233	Pemeriksa Teknologi Informasi	7	890
234	Pemulasaran Jenazah	3	340
235	Penagih Retribusi	3	340
236	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	7	890
237	Penata Kendaraan Dinas	7	890
238	Penata Laporan Keuangan	7	890
239	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	7	890
240	Penelaah Andalalin	7	890
241	Penelaah Angkutan Multimoda dan Logistic Centre	7	890
242	Penelaah Audit Keselamatan Jalan	7	890
243	Penelaah Bahan Jalan	7	890
244	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman	7	890
245	Penelaah Dampak Lingkungan	7	890
246	Penelaah Dampak Transportasi Perkotaan	7	890
247	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	890
248	Penelaah Keberatan Tingkat I	7	890
249	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	890
250	Penelaah Kemitraan Keselamatan Transportasi Jalan	7	890
251	Penelaah Kinerja Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6	690
252	Penelaah Manajemen Lintas	6	690
253	Penelaah Mutu Konstruksi	7	890
254	Penelaah Pelaksana Kemitraan Keselamatan	7	890
255	Penelaah Pemanduan Jaringan Transportasi Darat	7	890
256	Penelaah Pemohon Ijin Angkutan Barang	7	890
257	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan	7	890
258	Penelaah Pengembangan Usaha	7	890
259	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman	7	890
260	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	5	490
261	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	490
262	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	5	490

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
263	Pengadministrasi Anak Terlantar	5	490
264	Pengadministrasi Anggaran	5	490
265	Pengadministrasi Bahan Pengujian Prasarana	5	490
266	Pengadministrasi Barang Milik Negara	6	690
267	Pengadministrasi Batas Wilayah	5	490
268	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	490
269	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan	5	490
270	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	490
271	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	5	490
272	Pengadministrasi Karcis	5	490
273	Pengadministrasi Kebutuhan Impor	5	490
274	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
275	Pengadministrasi Kependidikan	5	490
276	Pengadministrasi Kependudukan	5	490
277	Pengadministrasi Keuangan	5	490
278	Pengadministrasi Kurikulum	5	490
279	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	490
280	Pengadministrasi LLAJ	5	490
281	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	490
282	Pengadministrasi Otonomi Daerah	5	490
283	Pengadministrasi Pajak	5	490
284	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	5	490
285	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490
286	Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan	5	490
287	Pengadministrasi Penerimaan	5	490
288	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	490
289	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	5	490
290	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	5	490
291	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490
292	Pengadministrasi Perizinan	5	490
293	Pengadministrasi Persuratan	5	490
294	Pengadministrasi Pertanahan	5	490
295	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	490
296	Pengadministrasi Rapat	5	490
297	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	5	490
298	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	5	490
299	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	490
300	Pengadministrasi Risalah	5	490
301	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
302	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	5	490
303	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	5	490
304	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5	490
305	Pengadministrasi Umum	5	490
306	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7	890
307	Pengatur Lalu Lintas	6	690
308	Pengatur Lalu Lintas Jalan	6	690
309	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	890
310	Pengawas dan Pembina Angkutan	7	890
311	Pengawas Harga Pangan	7	890
312	Pengawas Irigasi	7	890
313	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	890
314	Pengawas Kelistrikan	7	890
315	Pengawas Kepariwisataaan	7	890

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
316	Pengawas Keselamatan Angkutan	7	890
317	Pengawas Lalu Lintas Darat	7	890
318	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	7	890
319	Pengawas Mutu Hasil Perkebunan	7	890
320	Pengawas Olah raga	5	490
321	Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7	890
322	Pengawas Pemilihan Umum	7	890
323	Pengawas Penanaman Modal	7	890
324	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	7	890
325	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	890
326	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	7	890
327	Pengawas Perempuan dan Anak	7	890
328	Pengawas Terminal	7	890
329	Pengawas Transportasi	7	890
330	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	7	890
331	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690
332	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	6	690
333	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6	690
334	Pengelola Akuntansi	6	690
335	Pengelola Anggaran	6	690
336	Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas	6	690
337	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
338	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	6	690
339	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6	690
340	Pengelola Barang Milik Negara	6	690
341	Pengelola Barang Persediaan	6	690
342	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	690
343	Pengelola Data	6	690
344	Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	690
345	Pengelola Data Bantuan Sosial	6	690
346	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	6	690
347	Pengelola Data Keuangan Daerah	6	690
348	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	690
349	Pengelola Data Mutu Pendidikan	6	690
350	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	690
351	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	690
352	Pengelola Data Pencairan Dana	6	690
353	Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	6	690
354	Pengelola Data Rekonsiliasi	6	690
355	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	690
356	Pengelola Data Statistik	6	690
357	Pengelola Data Transaksi	6	690
358	Pengelola Data Transportasi Jalan	7	890
359	Pengelola Database	6	690
360	Pengelola Disiplin Pegawai	6	690
361	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	6	690
362	Pengelola Dokumentasi	6	690
363	Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan	6	690
364	Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Import	6	690
365	Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen	6	690
366	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	690
367	Pengelola Gaji	6	690
368	Pengelola Informasi Kepariwisata	6	690

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
369	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	6	690
370	Pengelola Jasa Konstruksi	6	690
371	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	690
372	Pengelola Kebidanan	6	690
373	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	690
374	Pengelola Kebutuhan Logistik	6	690
375	Pengelola Kefarmasian	6	690
376	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	6	690
377	Pengelola Kelengkapan Jalan	6	690
378	Pengelola Kepegawaian	6	690
379	Pengelola Keperawatan	6	690
380	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690
381	Pengelola Keuangan	6	690
382	Pengelola Laboratorium	6	690
383	Pengelola Layanan Kehumasan	6	690
384	Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	6	690
385	Pengelola Logistik	6	690
386	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	690
387	Pengelola Media Cetak	6	690
388	Pengelola Mutasi Penduduk	6	690
389	Pengelola Mutu	6	690
390	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan	6	690
391	Pengelola Pajak Daerah	6	690
392	Pengelola Pameran dan Peragaan	6	690
393	Pengelola Pasar	6	690
394	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	690
395	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	6	690
396	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	6	690
397	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
398	Pengelola Pemantauan	6	690
399	Pengelola Pemasaran	6	690
400	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	6	690
401	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	6	690
402	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690
403	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	690
404	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690
405	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	6	690
406	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	690
407	Pengelola Pemeliharaan Laboratorium	6	690
408	Pengelola Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	6	690
409	Pengelola Penataan Sampah	6	690
410	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	690
411	Pengelola Pendapatan	6	690
412	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	690
413	Pengelola Pengaduan Publik	6	690
414	Pengelola Pengawasan LLAJ	6	690
415	Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	6	690
416	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	690
417	Pengelola Pengembangan Otonomi Daerah	6	690
418	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	690
419	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	690
420	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	6	690
421	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	6	690

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
422	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	6	690
423	Pengelola Perijinan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek	6	690
424	Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah	6	690
425	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690
426	Pengelola Perlindungan Sosial	6	690
427	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	6	690
428	Pengelola Perparkiran	6	690
429	Pengelola Perpustakaan	6	690
430	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	690
431	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
432	Pengelola Program dan Laporan	6	690
433	Pengelola Program Gizi	6	690
434	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	690
435	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	6	690
436	Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan	6	690
437	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	690
438	Pengelola Rumah Tangga	6	690
439	Pengelola Sarana Angkutan	6	690
440	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	690
441	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal	6	690
442	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	6	690
443	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690
444	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	690
445	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	6	690
446	Pengelola Sistem Manajemen Jalan	6	690
447	Pengelola Statistik Perikanan	6	690
448	Pengelola Surat	6	690
449	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	690
450	Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan	6	690
451	Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan	6	690
452	Pengelola Teknis Perikanan Budidaya	7	890
453	Pengelola Terjemahan dan Kerjasama	6	690
454	Pengelola Terminal	6	690
455	Pengembang Sarana dan Prasarana	7	890
456	Pengemudi	3	340
457	Pengemudi Ambulan	4	440
458	Pengendali Jaringan Komunikasi	7	890
459	Pengendali Teknologi Informasi	7	890
460	Pengevaluasi Kinerja Prasarana LLAJ	7	890
461	Pengevaluasi Pelayanan Angkutan	7	890
462	Pengevaluasi Standar Pelayanan Minimum Angkutan	6	690
463	Pengevaluasi Tenaga Kependidikan	7	890
464	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	6	690
465	Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit	6	690
466	Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	6	690
467	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	690
468	Pengolah Daftar Gaji	6	690
469	Pengolah Data	6	690
470	Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	690
471	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
472	Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi	6	690
473	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
474	Pengolah Data Pemeriksaan	6	690



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
475	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	690
476	Pengolah Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	6	690
477	Pengolah Informasi dan Komunikasi	5	490
478	Penguji Bahan dan Bangunan	7	890
479	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	7	890
480	Penilik Jalan	5	490
481	Penjaga Taman Makam Pahlawan	3	340
482	Penyuluh Bencana	7	890
483	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	890
484	Penyuluh Kearsipan	7	890
485	Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	7	890
486	Penyuluh Kemananan Masyarakat	7	890
487	Penyuluh Kepemudaan	7	890
488	Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja	7	890
489	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	890
490	Penyuluh Lingkungan Hidup	7	890
491	Penyuluh Olah raga	7	890
492	Penyuluh Pangan	7	890
493	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan	7	890
494	Penyuluh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	7	890
495	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	7	890
496	Penyuluh Perkebunan	7	890
497	Penyuluh Pertahanan Negara	7	890
498	Penyuluh Statistik	7	890
499	Penyuluh Teknik Informatika	7	890
500	Penyuluh Tenaga Kerja	7	890
501	Penyurvei Batas Wilayah Administrasi	7	890
502	Penyurvei Pemaduan Moda Transportasi	7	890
503	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7	890
504	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
505	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
506	Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi	7	890
507	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7	890
508	Penyusun Laporan Keuangan	7	890
509	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	890
510	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	7	890
511	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
512	Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan	7	890
513	Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Masyarakat	7	890
514	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	7	890
515	Penyusun Rekayasa Lalu Lintas	7	890
516	Penyusun Rencana Analisis Kebutuhan Impor	7	890
517	Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam Negeri	7	890
518	Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri	7	890
519	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budaya	7	890
520	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	890
521	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	7	890
522	Penyusun Rencana Informasi Pasar Dalam Negeri	7	890
523	Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	7	890
524	Penyusun Rencana Investasi	7	890
525	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7	890
526	Penyusun Rencana Kebijakan	7	890
527	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	890

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
528	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
529	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
530	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7	890
531	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	7	890
532	Penyusun Rencana Mutasi	7	890
533	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Besar	7	890
534	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	890
535	Penyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi Impor	7	890
536	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	890
537	Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	7	890
538	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil dan Menengah	7	890
539	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	7	890
540	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7	890
541	Penyusun Rencana Uji Terap Teknik Pemasaran	7	890
542	Penyusun Risalah	7	890
543	Perancang Grafis	7	890
544	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	890
545	Perencana Lalu Lintas	7	890
546	Petugas Keamanan	3	340
547	Petugas Penindakan	7	890
548	Petugas Protokol	6	690
549	Petugas Ukur	3	340
550	Pramu Bakti	1	190
551	Pramu Kebersihan	1	190
552	Pramu Laboratorium	5	490
553	Pramu Taman	1	190
554	Pranata Acara	6	690
555	Pranata Barang dan Jasa	6	690
556	Pranata Bencana	6	690
557	Pranata Jamuan	5	490
558	Pranata Jaringan Iptek	6	690
559	Pranata Kearsipan	6	690
560	Pranata Koperasi	6	690
561	Pranata Pemadam Kebakaran	6	690
562	Pranata Perlindungan Masyarakat	5	490
563	Pranata Standar Keselamatan	6	690
564	Pranata Taman	5	490
565	Pranata Taman Makam Pahlawan	6	690
566	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	490
567	Pranata Tilang	6	690
568	Teknis Listrik, Telepon, AC dan Lift	5	490
569	Teknisi Air	5	490
570	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	5	490
571	Teknisi Gedung atau Bangunan	5	490
572	Teknisi Jaringan Instalasi	5	490
573	Teknisi Keciptakarya	5	490
574	Teknisi Konservasi Kelautan dan Perikanan	5	490
575	Teknisi Listrik dan Jaringan	5	490
576	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift	5	490
577	Teknisi Mesin	5	490
578	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	690
579	Teknisi Penerbangan	5	490
580	Teknisi Peralatan dan Mesin	5	490

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
581	Teknisi Peralatan Kantor	5	490
582	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	5	490
583	Teknisi Perikanan Budidaya	5	490
584	Teknisi Produksi Multimedia dan WEB	5	490
585	Teknisi Rancang Bangun	5	490
586	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	490
587	Teknisi Survei Angkutan Jalan	6	690
588	Teknisi Survei Jaringan Transportasi	6	690
589	Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan	5	490
590	Verifikator Anggaran	6	690
591	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690
592	Verifikator Keuangan	6	690
593	Verifikator Medis	6	690
594	Verifikator Pajak	6	690

WALI KOTA DUMAI

dto

PAISAL